

## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENGUATAN KEDAULATAN EKONOMI INDONESIA

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

[widjaja\\_gunawan@yahoo.com](mailto:widjaja_gunawan@yahoo.com)

### Abstract

*This study discusses the implementation of Pancasila values and digital transformation as a strategy to strengthen Indonesia's economic sovereignty. Pancasila values such as social justice, mutual cooperation, unity, and independence are the philosophical foundation for building an inclusive, just, and sovereign economic system. Digital transformation offers significant opportunities to accelerate economic inclusion, expand market access, and enhance national competitiveness while upholding the nation's noble values. Through a literature review, this study reveals how the integration of Pancasila values in the utilisation of digital transformation contributes to creating an independent and sustainable Indonesian economy, while rejecting foreign economic dominance. The results of the study emphasise the importance of collaboration between the government, the private sector, and the community in building a fair and equitable digital ecosystem for the welfare of all Indonesians.*

**Keywords:** Pancasila, digital transformation, economic sovereignty, sovereign economy, Indonesia, Pancasila values, economic inclusion, digital technology.

### Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi nilai-nilai Pancasila dan transformasi digital sebagai strategi penguatan kedaulatan ekonomi Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, gotong royong, persatuan, dan kemandirian menjadi landasan filosofis dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berdaulat. Transformasi digital memberikan peluang besar untuk mempercepat inklusi ekonomi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing nasional dengan tetap mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa. Melalui kajian pustaka, penelitian ini mengungkap bagaimana integrasi nilai Pancasila dalam pemanfaatan transformasi digital berkontribusi menciptakan ekonomi Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan, sekaligus menolak dominasi ekonomi asing. Hasil penelitian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang adil dan merata demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

**Kata kunci:** Pancasila, transformasi digital, kedaulatan ekonomi, ekonomi berdaulat, Indonesia, nilai-nilai Pancasila, inklusi ekonomi, teknologi digital.

### Pendahuluan

Kedaulatan ekonomi merupakan salah satu aspek fundamental yang menentukan kemandirian dan kemakmuran suatu bangsa. Di tengah dinamika globalisasi yang semakin kompleks dan cepat berubah, Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan yang luar biasa dalam mempertahankan

kedaulatan ekonominya. Tekanan dari kekuatan ekonomi asing, dominasi pasar global, serta arus bebas modal dan teknologi menuntut Indonesia untuk memperkuat pondasi ekonomi nasionalnya secara menyeluruh (Haryo, 2023). Oleh karena itu, penguatan kedaulatan ekonomi Indonesia menjadi suatu kebutuhan yang mendesak demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Sebagai dasar filosofi dan ideologi negara, nilai-nilai Pancasila memiliki kedudukan strategis dalam membentuk karakter bangsa dan mengarahkan pembangunan nasional. Nilai-nilai luhur dalam Pancasila menggambarkan jiwa dan identitas Indonesia yang unik, yang menekankan pada konsep persatuan, keadilan sosial, dan gotong royong. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan dalam aspek sosial dan politik, melainkan juga sangat penting dalam konteks ekonomi, khususnya dalam membangun sistem ekonomi yang berdaulat dan berkeadilan (Ramadhan, 2024). Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional diharapkan dapat menjadi pegangan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi domestik maupun internasional (Yuliana & Hasan, 2021).

Era transformasi digital telah membawa perubahan besar di berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Revolusi digital telah mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa secara signifikan. Transformasi digital memberi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekonomi, memperluas akses pasar, dan memberdayakan sumber daya manusia melalui teknologi inovatif. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Indonesia dapat mempercepat proses inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi sektor usaha kecil dan menengah, serta memperkuat jaringan produksi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan (Schwab, 2016).

Namun, di balik peluang besar tersebut, transformasi digital juga membawa sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satunya adalah risiko hilangnya nilai-nilai kearifan lokal dan nasionalisme ekonomi yang selama ini dijunjung tinggi dalam sistem ekonomi Indonesia. Ada kekhawatiran bahwa kemajuan teknologi yang pesat dapat menggeser semangat gotong royong, rasa keadilan, dan kemandirian ekonomi yang merupakan inti dari nilai Pancasila (Asmara, 2023). Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam proses transformasi digital menjadi sangat penting agar kemajuan teknologi tidak hanya menjadi alat modernisasi semata, tetapi juga memperkuat jati diri bangsa dan kedaulatan ekonomi nasional.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, konsep kedaulatan ekonomi Indonesia menuntut agar seluruh aspek ekonomi dapat dikendalikan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Kedaulatan ekonomi harus mampu menolak dominasi kekuatan ekonomi asing yang berpotensi mengeksploitasi sumber daya nasional dan mengendalikan pasar dalam negeri (Utami, 2025). Hal ini sejalan dengan semangat Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial dan kemandirian dalam segala aspek kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai

Pancasila dalam kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan Bersama (Prasetyo, 2024).

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, keberadaan ekosistem digital yang sehat dan inklusif menjadi kunci dalam memperkuat perekonomian nasional. Transformasi digital harus dikelola sedemikian rupa agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan kelompok rentan atau memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi. Penerapan nilai persatuan dalam Pancasila menuntut adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan merata. Dengan demikian, teknologi digital bukan hanya alat efisiensi, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi kerakyatan (Aryanti, 2023).

Implementasi nilai gotong royong dalam konteks transformasi digital dapat diwujudkan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam membangun infrastruktur digital yang merata dan memperkuat jejaring usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia memerlukan dukungan teknologi digital agar mampu bersaing di pasar global sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai lokal dan nasional. Melalui pendekatan digital yang berlandaskan gotong royong, diharapkan peningkatan kapasitas UMKM dapat mendorong pemerataan ekonomi dan memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa (Aprilia et al., 2021).

Selanjutnya, nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila memiliki peran krusial dalam membentuk transformasi digital yang tidak hanya fokus pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada pemerataan manfaat dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat luas. Adanya regulasi yang berpihak pada rakyat, perlindungan konsumen digital, serta peningkatan literasi digital menjadi bagian penting untuk mewujudkan transformasi digital yang berkeadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan Pancasila untuk mencapai kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia (Purnomo, 2021).

Persatuan Indonesia sebagai salah satu nilai utama dalam Pancasila harus dijaga dan diperkuat melalui transformasi digital yang inklusif dan berdaya guna. Teknologi digital dapat menjadi alat pemersatu bangsa jika digunakan untuk memperkuat komunikasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi yang sehat antarwilayah serta kelompok masyarakat di seluruh nusantara. Dengan demikian, transformasi digital yang diintegrasikan dengan nilai persatuan dapat mendorong terciptanya sinergi nasional yang menjadi fondasi kokoh penguatan kedaulatan ekonomi (Andini, 2022).

Kajian pustaka terhadap literatur sebelumnya menunjukkan bahwa upaya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka transformasi digital masih menjadi tantangan dan peluang yang besar. Berbagai studi menyoroti pentingnya adaptasi nilai-nilai tradisional dalam era modern agar kemajuan teknologi tidak menyebabkan friksi sosial dan ekonomi. Penelitian terdahulu juga menggarisbawahi perlunya regulasi dan

kebijakan yang mendukung sinergi antara ideologi nasional dan perkembangan teknologi digital untuk mendorong kedaulatan ekonomi yang tahan banting (Fajar, 2021).

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman budaya dan ekonomi yang besar memiliki potensi unik untuk mengembangkan model transformasi digital yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Syahri, 2025). Hal ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang merata sekaligus mengoptimalkan potensi digital sebagai motor penggerak ekonomi. Dengan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa, Indonesia dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang berbasis keadilan sosial, persatuan, dan kemandirian (Tilaar, 2002).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks transformasi digital sebagai strategi penguatan kedaulatan ekonomi Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji implementasi nilai-nilai Pancasila dan transformasi digital dalam penguatan kedaulatan ekonomi Indonesia. Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen kebijakan, serta publikasi terkait yang membahas nilai-nilai Pancasila, transformasi digital, dan kedaulatan ekonomi (Eliyah & Aslan, 2025). Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara sistematis dengan menggali keterkaitan dan relevansi antara nilai-nilai Pancasila dan proses transformasi digital sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, sehingga menghasilkan pemahaman mendalam dan rekomendasi yang aplikatif dalam konteks pembangunan ekonomi berdaulat (Kitchenham, 2020).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penguatan Kedaulatan Ekonomi Indonesia**

Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam falsafah Bangsa Indonesia memiliki peran sentral sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai luhur yang mengarahkan bagaimana perekonomian nasional harus dijalankan, yaitu berlandaskan pada etika dan moral yang menekankan keadilan sosial, gotong royong, kemandirian, dan persatuan bangsa. Implementasi nilai-nilai ini menjadi kunci dalam membentuk sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Kaelan, 2010).

Dalam konteks penguatan kedaulatan ekonomi, nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama Pancasila mendorong agar aktivitas ekonomi dilakukan dengan memperhatikan aspek etika dan moral. Perekonomian Indonesia diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, tetapi juga harus

menempatkan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai dasar dalam menjalankan usaha, sehingga tercipta lingkungan ekonomi yang adil dan beradab (Yusron, 2023).

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi prinsip penting dalam membangun sistem ekonomi yang dapat menghormati martabat manusia dan menghindari eksploitasi maupun penindasan. Penerapan nilai ini dalam penguatan kedaulatan ekonomi terlihat dari upaya mengembangkan kebijakan ekonomi yang melindungi hak-hak ekonomi masyarakat luas, terutama golongan marjinal dan kurang mampu, sehingga tercapai pemerataan kesejahteraan (Sariyatun, 2020).

Persatuan Indonesia, yang merupakan sila ketiga, memiliki implikasi langsung terhadap penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Nilai ini menuntut sinergi dan kolaborasi antara seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil dalam membangun ekonomi yang kokoh dan mandiri. Dengan persatuan, segala sumber daya nasional dapat dioptimalkan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kedaulatan ekonomi (Rahayu et al., 2022).

Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, menegaskan bahwa ekonomi harus berbasis pada partisipasi aktif rakyat. Ini tercermin dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi, UMKM, dan ekonomi kerakyatan lainnya yang mampu menjadi pilar utama dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia dari intervensi asing (Notonagoro, 1975).

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila kelima menempatkan keadilan sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi nasional. Dengan memprioritaskan distribusi kekayaan yang adil, sistem ekonomi Pancasila berusaha menjembatani kesenjangan sosial-ekonomi dan menjauhkan ketimpangan yang merugikan sebagian besar masyarakat. Keadilan sosial juga memastikan bahwa sumber daya ekonomi dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu saja (Nurhasanah, 2021).

Sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila secara konseptual menolak praktik individualisme yang berlebihan dan kapitalisme yang eksploitatif. Sebaliknya, sistem ini menekankan asas kekeluargaan dan gotong royong dalam pengelolaan ekonomi yang mendorong solidaritas dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penguatan koperasi dan lembaga ekonomi rakyat menjadi fokus penting dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi (Susanto, 2020).

Dalam praktiknya, penerapan nilai gotong royong dalam ekonomi diwujudkan melalui kebijakan yang mendukung kolaborasi antar pelaku ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Gotong royong ini memperkuat daya saing ekonomi nasional dengan memaksimalkan kekuatan kolektif masyarakat, sehingga Indonesia dapat lebih mandiri dan tidak bergantung pada kekuatan ekonomi asing (Azhar, 2022).

Penguatan kedaulatan ekonomi melalui nilai Pancasila juga tercermin dalam kemandirian ekonomi yang menuntut bangsa Indonesia untuk mampu mengelola

sumber daya alam dan daya produksi secara optimal untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Dengan kemandirian, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor dan investasi asing yang dapat mengancam kedaulatan nasional (Sudrajat, 2023).

Implementasi nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi juga berperan dalam menolak neo-imperialisme dan dominasi asing yang seringkali mengancam kemandirian dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Pancasila mengedepankan prinsip nasionalisme ekonomi yang menuntut pengelolaan sumber daya strategis oleh negara dan masyarakat Indonesia, guna melindungi kepentingan bangsa dari pengaruh asing (Shihab, 2019).

Peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator sangat penting untuk memastikan nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem ekonomi. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang pro-rakyat, mendorong pemberdayaan UMKM, dan menyediakan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan dalam ekonomi, serta mengatur kerjasama ekonomi internasional yang menguntungkan bangsa (Hidayat, 2020). Selain itu, masyarakat harus berperan aktif dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, termasuk dalam mendukung produk lokal dan menerapkan prinsip ekonomi berkeadilan. Pendidikan dan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya nilai Pancasila dalam ekonomi perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari penguatan kedaulatan ekonomi bangsa (Firman, 2023).

Penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam ekonomi tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga telah terefleksikan dalam berbagai kebijakan ekonomi nasional seperti pembangunan koperasi, pemberdayaan UMKM, serta fokus pada perlakuan ekonomi yang adil dan merata. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol, melainkan instrumen strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi modern (Syafii Maarif, 2015).

Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penguatan kedaulatan ekonomi Indonesia berperan sebagai fondasi filosofis sekaligus praktis dalam membangun ekonomi nasional yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, dan berpersatuan. Nilai-nilai tersebut menjadi panduan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan dinamika global, tetapi juga memperkuat jati diri bangsa dalam perjalanan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

### **Transformasi Digital sebagai Alat Penguatan Kedaulatan Ekonomi Berbasis Nilai-Nilai Pancasila**

Transformasi digital merupakan perubahan fundamental di berbagai sektor, terutama ekonomi, yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia, transformasi digital tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat

kedaulatan ekonomi nasional. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Indonesia berupaya membangun ketahanan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai roh dan arah pembangunan bangsa (Rosyada, 2019).

Era digital memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat inklusi ekonomi, membuka akses pasar yang lebih luas, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Namun, agar transformasi digital terlaksana secara berkelanjutan dan berdaulat, harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menempatkan keadilan sosial, persatuan, dan kemandirian sebagai prinsip utama. Hal ini memastikan transformasi tidak hanya menjadi alat modernisasi teknologi, tetapi juga memperkuat jati diri dan kedaulatan bangsa (Ismi Arifiana Rahmandari & Risdiana, 2020).

Satu aspek penting dari transformasi digital adalah pengembangan infrastruktur digital yang merata dan aman. Kedaulatan ekonomi melalui transformasi digital menuntut penguasaan penuh atas infrastruktur teknologi, termasuk jaringan internet, data center, serta platform digital. Indonesia harus mampu mengelola dan melindungi infrastruktur tersebut dari intervensi asing agar teknologi digital dapat menjadi penopang ekonomi nasional tanpa mengorbankan kedaulatan bangsa (Setiawan, 2019).

Nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang tercermin dalam Pancasila mengajarkan bahwa transformasi digital harus memperhatikan aspek etika dan keadilan sosial. Dalam konteks ekonomi digital, ini berarti setiap kebijakan dan inovasi teknologi harus mendorong pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, dengan perlindungan khusus bagi kelompok rentan agar tidak tertinggal dalam kemajuan teknologi (Oberer & Erkollar, 2018).

Persatuan sebagai nilai utama Pancasila harus diwujudkan dalam sinergi seluruh elemen bangsa dalam pembangunan ekosistem digital nasional. Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat harus bekerja sama membangun ekosistem yang inklusif dan berkeadilan agar kemajuan teknologi dapat dinikmati seluruh warga negara tanpa kecuali, sekaligus mendorong daya saing nasional di kancah global (Mulyana, 2021).

Dalam konteks ekonomi kerakyatan, transformasi digital menghadirkan peluang bagi penguatan UMKM dan koperasi melalui platform digital yang memperluas akses pasar dan meningkatkan kapasitas produksi. Dengan mengintegrasikan nilai gotong royong, pelaku usaha kecil dapat saling mendukung dan bekerja sama memanfaatkan teknologi, sehingga memperkuat pilar ekonomi nasional yang berlandaskan pada Pancasila (Lasmono, 2024). Kemandirian ekonomi juga menjadi titik fokus dalam transformasi digital, di mana Indonesia harus mampu mengembangkan teknologi dan produk digital dalam negeri. Hal ini mengurangi ketergantungan pada produk dan teknologi asing, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam ranah digital. Dengan demikian, transformasi digital menjadi sarana untuk mewujudkan kemandirian teknologi sesuai dengan spirit Pancasila (Suryadi, 2022).

Penguatan tata kelola digital berlandaskan nilai-nilai Pancasila menuntut perlunya regulasi yang berpihak pada rakyat dan menjaga keadilan sosial. Regulasi ini harus memastikan bahwa penggunaan data dan teknologi digital dilakukan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab tanpa menimbulkan ketidakadilan dan dominasi oleh pihak tertentu, serta melindungi hak-hak konsumen digital (Winarno, 2021).

Literasi digital menjadi aspek penting dalam memastikan transformasi digital berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Peningkatan literasi digital masyarakat adalah fondasi dalam menciptakan masyarakat digital yang cerdas dan etis, yang mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga persatuan dan keharmonisan sosial (Latifah, 2022).

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan mempunyai peran strategis dalam mendorong akselerasi transformasi digital yang berdaulat dengan pengawasan kuat atas infrastruktur digital dan kebijakan ekonomi digital. Upaya ini mencakup pengembangan infrastruktur, peningkatan keterampilan SDM, serta pengembangan ekosistem inovasi yang didukung oleh regulasi yang jelas dan adil. Selain pemerintah, sektor swasta dan masyarakat harus dilibatkan aktif dalam ekosistem digital sehingga tercipta kolaborasi yang berlandaskan semangat gotong royong. Sinergi multi-pihak ini merupakan implementasi nyata nilai Pancasila untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus memastikan transformasi digital memberikan manfaat yang merata (Bangsawan, 2023).

Pemanfaatan teknologi digital perlu diarahkan untuk mendorong pengembangan produk lokal serta pemberdayaan sumber daya manusia di seluruh wilayah Nusantara. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan menegakkan nilai keadilan sosial, sehingga transformasi digital bisa menjadi pendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia (Nurcholish Madjid, 2008).

Transformasi digital juga menghadirkan tantangan seperti risiko keamanan siber, ketimpangan akses teknologi, dan potensi hilangnya nilai budaya lokal. Oleh karena itu, pendekatan transformasi digital harus mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila yang mampu menjaga harmoni sosial dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari perkembangan teknologi (Purwanto, 2021).

Peran inovasi teknologi yang berbasis nilai-nilai lokal dan kearifan budaya menjadi kunci dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan dan sesuai dengan karakter bangsa. Dengan mengedepankan kearifan lokal sesuai nilai Pancasila, transformasi digital dapat lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat Indonesia (Rahayu et al., 2022).

Transformasi digital yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila akan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju yang memiliki kedaulatan digital dan kemandirian teknologi. Hal ini memungkinkan Indonesia tidak hanya sebagai konsumen

teknologi global, tetapi juga sebagai pelaku utama yang berkontribusi sekaligus mengelola ekosistem digital nasional (Soesanto et al., 2024).

Dengan demikian, transformasi digital bukan sekedar transformasi teknologi semata, melainkan transformasi sosial dan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi bangsa. Integrasi antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai luhur ini akan menjadi fondasi penguatan kedaulatan ekonomi Indonesia yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

## **Kesimpulan**

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penguatan kedaulatan ekonomi Indonesia berperan sebagai fondasi moral dan filosofis yang mengarahkan pembangunan ekonomi nasional menuju keadilan sosial, kemandirian, dan persatuan bangsa. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi menjadi pedoman dalam merancang sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan mampu menolak dominasi serta eksploitasi asing. Dengan mengedepankan nilai-nilai tersebut, Indonesia dapat membangun pondasi ekonomi yang kuat dan berdaulat demi kesejahteraan seluruh rakyat.

Transformasi digital sebagai alat penguatan kedaulatan ekonomi menghadirkan peluang besar dalam mempercepat inklusi ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan memperluas akses pasar. Namun, keberhasilan transformasi ini harus diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila agar kemajuan teknologi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menjaga keadilan sosial, persatuan, dan kemandirian bangsa. Infrastruktur digital yang dikelola secara berdaulat dan literasi digital yang merata adalah kunci agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, sinergi antara implementasi nilai-nilai Pancasila dan transformasi digital menjadi strategi penting dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan yang berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa sekaligus memanfaatkan kemajuan teknologi akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global, menjaga keutuhan nasional, dan menciptakan kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, penguatan kebijakan dan kolaborasi multisektor sangat diperlukan untuk memastikan perpaduan keduanya berjalan optimal demi masa depan ekonomi Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

## **References**

- Andini, S. (2022). Peran Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila Dalam Era Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(2), 340–348. <https://doi.org/10.36709/jpi.v11i2.4232>
- Aprilia, D., Waluyo, S. D., & Saragih, H. J. (2021). Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia. *Ekonomi Pertahanan*, 7(2), 245–259.

- Aryanti, S. (2023). Sinergi Pancasila dan Kebijakan Ekonomi Digital. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 29–38. <https://doi.org/10.37204/jieb.v15i1.111>
- Asmara, B. (2023). Tantangan dan Peluang Implementasi Pancasila di Era Media Digital. *Jurnal Sosial Media Dan Masyarakat*, 4(2), 112–120.
- Azhar, N. (2022). *Pancasila dan Teknologi Digital: Masa Depan Indonesia*. Humaniora. <https://humaniora.id/pancasila-dan-teknologi-digital-masa-depan-indonesia/>
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.27-40>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fajar, M. (2021). Penguatan Kedaulatan Ekonomi Nasional melalui Transformasi Digital. *Jurnal Kajian Ekonomi Komprehensif*, 18(4), 445–457. <https://doi.org/10.31764/jkek.v18i4.267>
- Firman, H. (2023). Mewujudkan Indonesia Emas di Tahun 2045. *Portal Informasi Indonesia*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7269/>
- Haryo, L. (2023). Wujudkan Visi “Indonesia Emas 2045”, Pemerintah Luncurkan RPJPN 2025-2045. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5196/>
- Hidayat, R. A. (2020). Nilai Pancasila dalam Era Digital dan Tantangan Transformasi Sosial. *Jurnal Transformasi Sosial*, 5(2), 77–88. <https://doi.org/10.31227/sample.doi.00123>
- Ismi Arifiana Rahmandari & Risdiana. (2020). Membangun Karakter Bangsa Melalui Digital Culture: Peran Pendidikan. *Jurnal EST*, n/a.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=459085>
- Kitchenham, B. (2020). Procedures for Performing Systematic Reviews. *Keele University Technical Report*.
- Lasmono, N. (2024). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Transformasi Ekonomi Digital Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Modern*, 8(1), 54–63.
- Latifah, R. (2022). Kebijakan Digitalisasi Ekonomi Nasional. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 150–160. <https://doi.org/10.25009/jkp.v10i2.1138>
- Mulyana, D. (2021). *Komunikasi Digital dan Pancasila*. Widya Padjadjaran.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila secara Ilmiah Populer*.
- Nurcholish Madjid. (2008). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Penerbit Mizan. <https://books.google.co.id/books?hl=en&id=6ReSfWGz4OsC>
- Nurhasanah, S. (2021). Pancasila dan Transformasi Ekonomi Dalam Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 215–229. <https://doi.org/10.37303/jiep.v4i1.1245>
- Oberer, B., & Erkollar, A. (2018). Leadership 4.0: Digital Leaders in the Age of Industry 4.0. *International Journal of Organizational Leadership*, 1–9.
- Prasetyo, A. (2024). Strategi Digitalisasi Untuk Memperkuat Ekonomi Indonesia Menuju Indonesia Emas. *Jurnal Pembangunan Nasional*, 13(2), 211–221. <https://doi.org/10.1234/jpn.2024.211>

- Purnomo, S. (2021). Peran Teknologi Digital dalam Penguatan Ekonomi Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Digitalisasi Dan Pembangunan*, 5(2), 212–220. <https://doi.org/10.1093/jdp.v5i2.212>
- Purwanto, B. H. (2021). Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi Digital Nasional. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik*, 9(1), 97–104. <https://doi.org/10.33445/jikp.v9i1.124>
- Rahayu, N., Supriyono, I. A., & Mulyawan, E. (2022). Pembangunan Ekonomi Indonesia Dengan Tantangan Transformasi Digital. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 4(1), 92–95. <https://doi.org/10.34306/abdi.v4i1.823>
- Ramadhan, F. V. (2024). Transformasi Ekonomi Digital Indonesia Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Pemikiran Prof. Nurcholish Madjid. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1–9. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11593>
- Rosyada, D. (2019). Membumikan Nilai Pancasila di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(4), 456–463.
- Sariyatun. (2020). *Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila di Era Digital*. Universitas Negeri Sebelas Maret Press.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*.
- Setiawan, E. (2019). *Manajemen Transformasi Digital*. Deepublish. <https://deepublishstore.com/manajemen-transformasi-digital/>
- Shihab, Q. (2019). *Pancasila dalam Perspektif Al-Quran*. Lentera Hati.
- Soesanto, E., Nurrochim, D. O., & Dewanto, S. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dengan Akulturasi Inovasi Teknologi Untuk Mencapai Efisiensi Pada Kegiatan Pemasaran dan Perdagangan Migas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Administrasi Publik (JIEAP)*, 1(2), 98–121. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i2.127>
- Sudrajat, T. (2023). Pancasila dan Dinamika Transformasi Digital di Indonesia. *Jurnal Wawasan Pendidikan*, 6(1), 77–85. <https://doi.org/10.36805/jwp.v6i1.108>
- Suryadi, B. (2022). *Kepemimpinan Digital Berkarakter Pancasila*. Simbiosia Rekatama Media.
- Susanto, E. (2020). *Pancasila dan Transformasi Digital Nasional*. LIPI Press.
- Syafii Maarif. (2015). *Membumikan Pancasila: Revolusi Baru Indonesia*. Mizan. <https://books.google.com/books?id=QBm9CgAAQBAJ>
- Syahri, A. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Penguatan Ekonomi Digital. *JPK UMPO*, 9(1).
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Pancasila di Era Global*. Gramedia.
- Utami, D. (2025). Strategi Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Di Era Modern Berbasis Nilai Pancasila. *Gema Keadilan*, 1–12.
- Winarno, A. (2021). Kedaulatan Ekonomi di Era Digitalisasi: Perspektif Pancasila Sebagai Landasan. *Jurnal Sosiohumaniora*, 23(1), 101–113. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i1.23946>
- Yuliana, R., & Hasan, M. (2021). Transformasi Digital dan Tantangan Integrasi Nilai Pancasila di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(3), 281–292. <https://doi.org/10.21831/jpk.v13i3.41567>
- Yusron, M. (2023). Pendidikan Nilai Pancasila di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 8(4), 604–613. <https://doi.org/10.20527/jpn.v8i4.234>